

PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN BERSERTA DAMPAK TERHADAP KEUANGAN

Alfatah, Memen Kustiawan, Fitriana

Universitas Sangga Buana YPKP, Jawa Barat Indonesia

Email: h_alfatah@yahoo.co.id, kustiawanmemen@gmail.com, fitrianadachlan64@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 23 Februari 2022 Direvisi 17 Maret 2022 Disetujui 23 Maret 2022	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel pada Penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2016 sampai 2020 untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak, peningkatan pendapatan daerah, dan tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan untuk mengetahui pengelolaan kas daerah menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 28 orang Kepala Bidang Pendapatan mewakili setiap daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektifitas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah. Teknis analisis pada penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel efektifitas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah, selain itu variabel efektifitas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah berpengaruh baik simultan maupun parsial terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian variabel efektifitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.
Kata Kunci: Efektivitas Pemungutan Pajak; Pengelolaan Kas Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah	
Keyword:	
	ABSTRACT <i>This research uses descriptive and verification methods. The sample in this study is the Target and Realization Report of Regency and City APBD in the West Java Provincial Government for the 2016 to 2020 Fiscal Year to determine the effectiveness of tax collection, increase regional income, and the level of regional financial independence, while to determine regional cash management using a distributed questionnaire. to 28 Heads of Revenue Sector representing each region. The purpose of this study was to determine the effect of the effectiveness of tax collection and regional treasury management on increasing local revenue and its impact on regional financial independence. Technical analysis in this study uses path analysis. The results in this study indicate that the effectiveness of tax collection and regional treasury management has a direct or indirect effect on regional financial independence, besides that the effectiveness of tax collection and regional treasury management has a simultaneous or</i>

How to cite:

Alfatah, Kustiawan Memen, Fitriana (2022). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Pengelolaan Kas Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Berserta Dampak Terhadap Keuangan, *Jurnal Syntax Transformation*, 3(3).

<https://doi.org/10.46799/jst.v3i3.527>

E-ISSN:

2721-2769

Published by:

Ridwan Institute

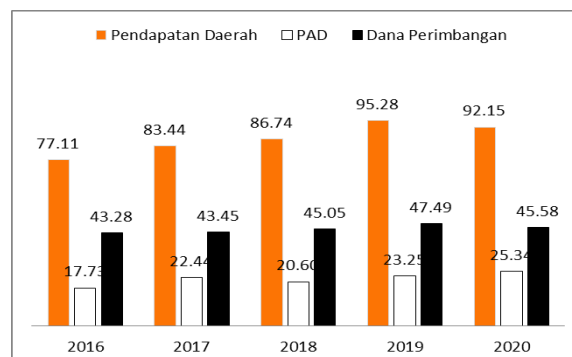
partial effect on increasing regional original income, then the effectiveness variable tax collection, regional treasury management, and increasing regional original income have a simultaneous effect on regional financial independence.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dimana di dalamnya merupakan gabungan berbagai daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Penerapan sistem desentralisasi sudah dimulai dari masa reformasi, pada sistem ini terdapat peralihan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah di daerah guna mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat di dalamnya. UU Tahun 2014 Nomor 23 menuliskan jika pemimpin daerah memiliki kedudukan untuk memajukan daerahnya dengan cara mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (HADI, 2019).

Desentralisasi fiskal atau desentralisasi keuangan merupakan salah satu caranya. Bentuk desentralisasi keuangan pada aktivitas pemerintahan adalah adanya dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diatur dalam UU Tahun 2004 No 33, melalui dana perimbangan ini pemerintah daerah memiliki ruang dalam hal mengatur dan menggali potensi kekayaan yang dimiliki oleh daerahnya tersebut (Putri & Darmayanti, 2019).

Saat ini, ketergantungan pemerintah di daerah terhadap dana perimbangan masih terbilang tinggi, mengandalkan lebih dari 50% dana perimbangan yang diterima oleh lebih dari 90% pemerintah daerah. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah di daerah tidak bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 1

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2016-2020 (Triliyun Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2020)

Berdasarkan gambar di atas, dari tahun 2016-2020 kontribusi PAD dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat berkisar antara 14,07% sampai 22,44%, disisi lain kontribusi dana perimbangan berkisar antara 44,72% sampai dengan 35,34%, persentase yang tersisa berasal dari pendapatan lain yang sah. Hal tersebut menyiratkan jika peranan PAD pada kabupaten/kota di Jawa Barat masih relatif kecil, hal ini menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan PEMDA kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat yang berarti hampir semua pendanaan belanja kabupaten/kota didanai oleh transfer dari pemerintah pusat. Jika melihat kategori kemandirian daerah yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri, maka melihat hasil peranan PAD wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat kurang lebih 14,07% - 22,44% berada di kategori tidak mandiri dan kurang mandiri.

Teori keagenan dan teori stewardship dipakai menjadi grand theory dalam penelitian ini. Teori keagenan menjelaskan bahwa di masa demokrasi ini masyarakat sebagai principal mempunyai hak dalam mengevaluasi kinerja

keuangan pemerintah daerah guna menciptakan kemandirian keuangan daerah, sedangkan teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang bertindak sebagai *steward* yang bekerja untuk rakyat. Pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan seluruh penerimaan daerah untuk kemakmuran rakyatnya agar dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah.

(Rahmi, 2013) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah mampu meraih kemandirian keuangan daerah bisa dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau memaksimalkan sumber - sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah. Beberapa fenomena mengenai pemungutan pajak daerah sekitar wilayah Provinsi Jawa Barat tercermin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, berikut beberapa permasalahan terkait dengan pajak daerah di tahun 2020 diantaranya :1. Pengelolaan PBB P2 di Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui sistem informasi manajemen obyek pajak belum memadai.2. Pengelolaan PBB dan penyajian piutang PBB di Pemerintah Kabupaten Bogor belum memadai.3. Pengendalian atas pemungutan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Karawang belum memadai.4. Penatausahaan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta tidak tertib.5. Tidak memadainya pengendalian daripada rekening dana PBB di Kabupaten Majalengka.6. Masih lemahnya pengelolaan pajak di Kabupaten Subang. 7. Pengelolaan PBB-P2 pada Kota Bekasi tidak sesuai ketentuan.8. Pengelolaan PBB-P2 pada Kota Bogor belum dilaksanakan dengan baik.9. Pengelolaan pajak daerah dan piutang pajak daerah pada Kota Cimahi tidak tertib. 10. Pada Kota Sukabumi terdapat potensi pajak dari reklame, air bawah tanah, dan lainnya belum diterapkan sebagai objek yang dikenakan pajak.

Pada dasarnya sistem perpajakan harus efektif, efisien, dan merata serta sederhana dalam hal melakukan pengadministrasiannya (Avianto et al., 2016). Pembentukan Undang-Undang Tahun 2009 No 28 diharapkan dapat menciptakan dan menyempurnakan sistem

pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dengan efektif.

Sektor penerimaan daerah lainnya yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tanpa harus membebani masyarakat seperti pajak dan retribusi daerah adalah dengan memanfaatkan arus kas (*cash flow*) dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan arus kas untuk menjadi sumber penerimaan hanya membutuhkan kreatifitas pemerintah daerah yang tidak membebani rakyat dalam bentuk pungutan apapun. Hal utama yang dibutuhkan adalah proyeksi mengenai besaran penerimaan dan pengeluaran untuk setiap bulannya dari target penerimaan dan alokasi belanja yang ada pada alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Informasi surplus arus kas beserta jangka waktunya adalah hal yang dapat dimanfaatkan agar mampu memaksimalkan sumber daya keuangan melalui investasi pada bentuk deposito. Fenomena di lapangan yang terjadi adalah setiap akhir tahun banyak dana pemerintah yang mengendap di perbankan, hal ini diduga karena banyaknya anggaran yang tidak terserap maupun rencana anggaran kas yang kurang optimal, dengan demikian akan ada banyak dana yang menganggur pada awal semester yang sebetulnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah menjadi investasi jangka pendek berbentuk deposito.

Belanja yang direalisasikan oleh pemerintah cenderung banyak dilakukan di semester kedua, dengan kata lain pada semester pertama banyak dana *idle* yang dapat dimaksimalkan menjadi penerimaan daerah, jika pemerintah daerah mampu menangkap peluang tersebut. Permasalahan kas menganggur yang menjadi perhatian pada pengelolaan kas di masing-masing daerah baik kota maupun kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat dapat menjadi bahan kajian yang menarik untuk diketahui pengaruhnya pada peningkatan pendapatan asli daerah dalam usaha menciptakan kemandirian keuangan daerah.

Dari fenomena yang diutarakan di atas, menunjukkan bahwa selama ini desentralisasi

fiskal belum dapat mendorong pemerintah daerah menjadi lebih mandiri, namun dengan adanya Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 28 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Nomor 39 diharapkan pemerintah daerah dapat menaikkan penerimaan daerahnya sehingga dapat meminimalkan ketergantungan atas dana dari pemerintah pusat. Hal tersebut di atas menjadikannya sebagai objek kajian terbuka untuk diteliti dan dianalisis.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana gambaran mengenai efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, dan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. (2) Berapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. (3) Berapa besar pengaruh pengelolaan kas daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. (4) Berapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. (5) Berapa besar pengaruh pengelolaan kas daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. (6) Berapa besar pengaruh peningkatan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. (7) Berapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. (8) Berapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei explanatory yang bersifat deskriptif dan verifikatif melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei eksplanatori merupakan penelitian yang dikerjakan dengan maksud agar mendapatkan deskripsi berupa fakta-fakta mengenai hubungan antara variabel yang akan diteliti (Ravindran et al., 2016).

Metode penelitian deskriptif ialah metode yang bertujuan untuk membentuk diagram, yaitu gambaran yang sistematis, realistis, serta akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara subjek dengan fenomena. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk mempelajari suatu fenomena atau faktor lain serta menentukan hubungan antara faktor satu dengan faktor lainnya. Di sisi lain, metode verifikasi adalah metode pengujian mengenai kebenaran suatu hipotesis dengan menggunakan data yang terkumpul di lapangan (Sasmito & Nawangsari, 2019)

Pendekatan kuantitatif dapat dipahami sebagai studi yang didasarkan pada filosofi aktif, dengan memeriksa suatu populasi atau sampel tertentu dan mengekstraksi sampel acak melalui analisis data statistik beserta dengan pengumpulan data yang menggunakan alat uji untuk menguji hipotesis yang dirumuskan, sedangkan pendekatan kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berdasarkan kepada paham postpositivisme, yang dipakai untuk kondisi objek alami, dan sumber data diambil sampelnya dengan teknik sampel purposive yang merupakan teknik penentuan sampel dengan menjelaskan karakteristik tertentu menurut tujuan dari penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Populasi yaitu area penelitian yang masih bersifat umum dimana terdapat obyek maupun subyek yang mempunyai karakter tertentu yang bisa dipelajari peneliti untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh laporan keuangan dan seluruh pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sampel ialah bagian

daripada sebuah populasi, melalui sebuah sampel dapat ditarik sebuah kesimpulan yang diterapkan umum pada populasi dalam penelitian (Karthikeyan et al., 2016).

Teknik sampling yang dipakai pada penelitian ini yaitu teknik sampling purposive, yang mana penentuan sebuah sampel melalui beberapa pertimbangan (Imron, 2018). Alasan penggunaan sampling ini dikarenakan tidak seluruh sampel mempunyai kriteria yang cocok berdasarkan fenomena, adapun sampel penelitian berupa Laporan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 dan responden sebanyak 28 orang Kepala Bidang Pendapatan mewakili setiap daerahnya.

Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri dari dua variabel independen (bebas) yaitu efektivitas pemungutan pajak (X1) dan pengelolaan kas daerah (X2), satu variabel intervening yaitu peningkatan pendapatan asli daerah (Y), dan satu variabel dependen (terikat) yaitu kinerja keuangan daerah (Z). Keempat variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (path analysis) untuk mengidentifikasi hubungan kausal diantara variabel sehingga dapat diketahui ketepatan hipotesis yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas ini dimaksudkan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu pertanyaan dalam kuesioner. Suatu pertanyaan dikatakan sah atau valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut dan memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3. Dalam penelitian ini, uji validitas ini hanya digunakan untuk variabel Pengelolaan Kas Daerah. Validitas item soal pertanyaan didapat melalui aktivitas mengkorelasikan skor soal terhadap total soal-soal per variabelnya. Jika koefisien

antara sebuah soal dengan total soal adalah $\geq 0,3$ berarti soal itu disebut valid, namun bila skor korelasinya $\leq 0,3$ berarti soal itu disebut tidak valid. Nilai korelasi dapat dicari dengan memakai rumus Pearson Product Moment melalui bantuan SPSS. Setelah dilakukan pengolahan data didapat nilai R hitung untuk masing-masing item pertanyaan/ Pernyataan adalah di atas 0,3 sehingga instrument pada penelitian ini dianggap valid.

Uji reliabilitas dipakai untuk mengukur sejauhmana kesamaan antara hasil ukur dengan menggunakan objek yang sama (Imron, 2018). Uji reliabilitas dipakai untuk menilai keandalan suatu variabel. Skor reliabilitas ditampilkan melalui koefisien Cronbach Alpha menurut kriteria minimal 0,6. Jika Cronbach Alpha $> 0,6$, maka alat uji tersebut dikatakan reliabel.

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

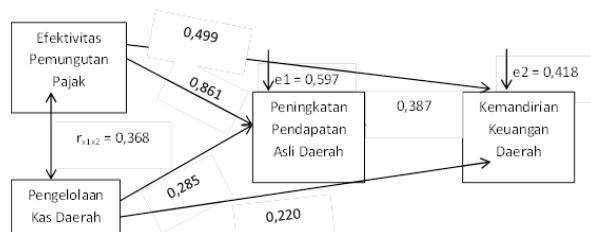
Variabel	r_{hitung}	Keterangan
Pengelolaan Kas Daerah	0,901	Reliabel

Sumber : Olah data 2021

Data-data pada tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dinyatakan reliabel, karena skornya $> 0,60$. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa penelitian ini dapat diandalkan, terlihat pada instrumen yang digunakan menunjukkan hasil yang reliabel.

Analisis jalur merupakan pengembangan dari Regresi Berganda sehingga dapat dilakukan estimasi besarnya pengaruh antara sejumlah variabel baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun langkah awal dalam melakukan analisis jalur adalah dengan merumuskan persamaan matematis pengaruh masing-masing variabel. Setelah dilakukan pengolahan data terkait variabel penelitian

dengan memakai analisis jalur didapatlah bagan analisis jalur seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2
Analisis Jalur

Dengan memperhatikan gambar di atas selanjutnya dapat diketahui pengaruh langsung dan tidak langsung setiap variabel seperti berikut:

Tabel 2
Dekomposisi Pengaruh Langsung & Tidak Langsung dari Setiap Variabel

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
$X_1 \rightarrow Y$	86,1%	9,03%	95,13%
$X_2 \rightarrow Y$	28,5%	9,03%	37,53%
$X_1 \rightarrow Z$	49,9%	33,32%	83,22%
$X_2 \rightarrow Z$	22,0%	11,03%	33,03%
$Y \rightarrow Z$	59,5%	38,70%	98,20%
$X_1, X_2 \rightarrow Y$			64,30%
$X_1, X_2, Y \rightarrow Z$			82,50%

Sumber : Olah data 202

Tabel 3
Hasil Uji t

	t _{tabel}	Sig.
$X_1 \rightarrow Y$	6,700	0,000
$X_2 \rightarrow Y$	2,213	0,036
$X_1 \rightarrow Z$	3,248	0,003
$X_2 \rightarrow Z$	2,189	0,039
$Y \rightarrow Z$	2,708	0,012

Sumber : Olah Data, 2021

Berdasarkan data tabel 3 di atas maka dapat dilihat: Hipotesis 1 Untuk variabel efektivitas pemungutan pajak didapat nilai thitung = 6,700 dan nilai ttabel = 2,048 sehingga thitung > ttabel dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$ maka Ho1 ditolak artinya menolak dugaan yang menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Y). Dengan kata lain efektivitas pemungutan pajak secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hipotesis 2 Untuk variabel pengelolaan kas daerah didapat nilai thitung = 2,213 dan nilai ttabel = 2,048 sehingga thitung > ttabel dan nilai signifikansi sebesar $0,036 < 0,050$ maka Ho2 ditolak artinya menolak dugaan yang menyatakan bahwa pengelolaan kas daerah (X_2) tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Y).

Dengan kata lain pengelolaan kas daerah secara parsial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hipotesis 3 Untuk variabel efektivitas pemungutan pajak didapat nilai thitung = 2,189 dan nilai ttabel = 2,048 sehingga thitung > ttabel dan nilai signifikansi sebesar $0,039 < 0,050$ maka Ho3 ditolak artinya menolak dugaan yang menyatakan bahwa efektivitas pemungutan pajak (X_1) tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemandirian keuangan daerah (Z).

Dengan kata lain efektivitas pemungutan pajak secara langsung berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hipotesis 4 Untuk variabel pengelolaan kas daerah didapat nilai thitung = 3,248 dan nilai ttabel = 2,048 sehingga thitung > ttabel dan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,050$ maka Ho4 ditolak artinya menolak dugaan yang menyatakan bahwa pengelolaan kas daerah (X_2) tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemandirian keuangan daerah (Z). Dengan kata lain pengelolaan kas daerah secara langsung berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hipotesis 5 Untuk variabel peningkatan pendapatan asli daerah didapat nilai thitung = 2,708 dan nilai ttabel = 2,048 sehingga

thitung > ttabel dan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,050$ maka H_05 ditolak artinya menolak dugaan yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah (Y) tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Z). Dengan kata lain peningkatan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 4
Hasil Uji Simultan (Uji F)

	t_{tabel}	Sig.
$X_1 \rightarrow Y$	22,480	0,000
$X_2 \rightarrow Y$		
$Y \rightarrow Z$	37,702	0,000
$X_1 \rightarrow Z$		
$X_2 \rightarrow Z$		

Sumber : Olah data, 2021

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka didapat: Hipotesis 6 Untuk pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y diperoleh nilai Fhitung sebesar 22,480 dengan Ftabel sebesar 3,34 sehingga Fhitung > Ftabel dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$ maka H_06 ditolak, artinya menolak dugaan yang menyatakan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak (X_1) dan pengelolaan kas daerah (X_2) tidak berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Y).

Dengan kata lain efektivitas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hipotesis 7 Untuk pengaruh variabel X_1 , X_2 , dan Y terhadap Z diperoleh nilai Fhitung sebesar 37,702 dengan Ftabel sebesar 3,34 sehingga Fhitung > Ftabel dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$ maka H_07 ditolak, artinya menolak dugaan yang menyatakan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak (X_1), pengelolaan kas daerah (X_2), dan peningkatan pendapatan asli daerah (Y) tidak berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah (Z). Dengan kata lain efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah, dan peningkatan pendapatan asli

daerah secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

B. Analisis Deskriptif Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis deskriptif diperoleh nilai Rata-rata efektivitas pemungutan pajak setiap daerah berada pada kategori sangat efektif yaitu sebanyak 68% daerah. Artinya setiap tahunnya daerah tersebut mampu melakukan penarikan jumlah pajak daerahnya melebihi dari jumlah yang sudah dianggarkan. Namun demikian kenyataannya masih banyak potensi pajak yang masih dapat digali oleh setiap daerahnya, karena seperti yang kita ketahui wilayah di Provinsi Jawa Barat memiliki banyak sekali kabupaten dan kota yang masing-masing daerahnya merupakan destinasi bisnis dan wisata sehingga setiap daerah mampu menggali potensi pajak baru sesuai dengan kearifan lokal yang mereka miliki, dan pemerintah sampai saat ini masih berjibaku untuk mengurus pemugutan pajak dengan potensi pajak minim seperti pajak iklan dan hiburan, pajak air tanah, PBB, dan lain sebagainya.

Untuk pengelolaan kas dengan menggunakan instrument kuesioner didapat rata-rata skor tanggapan yang diperoleh adalah sebesar 4,27 sehingga masuk ke dalam kategori sangat baik. Artinya pengelolaan kas daerah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

Untuk variabel peningkatan PAD dalam kurun waktu 5 tahun, rata-rata tertinggi diperoleh Kabupaten Bandung Barat dan terendah adalah Kota Banjar. Sebagian besar daerah mengalami penurunan dalam waktu satu tahun terakhir, di mana hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi covid yang menyebabkan penarikan jumlah pajak belum bisa optimal dimana kita tahu jika pajak merupakan komponen terbesar dalam pendapatan asli daerah.

Untuk variabel kemandirian keuangan daerah didapat rata-rata kemandirian tertinggi diperoleh Provinsi Jawa Barat dan terendah adalah Kabupaten Pangandaran. Rata-rata kemandirian setiap daerah didominasi pada

kategori sangat rendah yaitu sebanyak 50% daerah dengan pola instruktif. Artinya sebagian besar daerah masih bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat dan setiap daerah belum mampu menggali potensi daerahnya masing-masing yang dapat meningkatkan pendapatan. C. Analisis Verifikatif, 1. Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari perhitungan uji t (parsial), didapat nilai signifikansi variabel efektivitas pemungutan pajak sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung $> t_{tabel}$, maka H1 diterima yaitu efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan perhitungan analisis jalur dihasilkan bahwa efektivitas pemungutan pajak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 86,1% dan secara tidak langsung sebesar 9,03% dengan total pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 95,13%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak memiliki andil yang besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan (Taylor et al., 2014) yang menyatakan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat berusaha mengoptimalkan pendapatan asli daerah setinggi-tingginya lewat aktivitas peningkatan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoharis Baru (2018) yang menyatakan efektivitas pungutan pajak hotel dan restoran memiliki kontribusi pada peningkatan PAD, yang mana pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah, seperti yang telah dituangkan pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Hariyanto et al., 2021) bahwa efektivitas dan kontribusi pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 2. Pengaruh Pengelolaan Kas Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dari perhitungan uji t (parsial), didapat nilai signifikansi variabel efektivitas pemungutan pajak sebesar $0,036 < 0,05$ dan nilai thitung $> t_{tabel}$, maka H2 diterima yaitu pengelolaan kas daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan perhitungan analisis jalur dihasilkan bahwa pengelolaan kas daerah berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 28,5% dan secara tidak langsung sebesar 9,03% dengan total pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 37,5%.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Modlin & La Shonda, 2012) yang memperlihatkan adanya pengaruh antara manajemen kas dari suatu pemerintah daerah dengan peningkatan pendapatan daerah tersebut. 3. Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari perhitungan uji t (parsial), didapat nilai signifikansi variabel efektivitas pemungutan pajak sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai thitung $> t_{tabel}$, maka H3 diterima yaitu efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan perhitungan analisis jalur dihasilkan bahwa efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 83,22% dengan proporsi pengaruh langsung sebesar 49,9% dan pengaruh tidak langsung atau melalui variabel peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 33,32%.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan (Halim et al., 2014) yang menyatakan Kemandirian keuangan pada daerah memperlihatkan kemapanan Pemerintah Daerah dalam hal mendanai aktivitas pemerintahannya, pembangunan serta pelayanan pada masyarakat dimana masyarakat tersebut telah membayar pajak serta retribusi yang merupakan sumber yang diperlukan oleh daerah. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2021) yang menyimpulkan pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 4. Pengaruh Pengelolaan Kas Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari perhitungan uji t (parsial), didapat nilai signifikansi variabel efektivitas pemungutan pajak sebesar $0,039 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_4 diterima yaitu pengelolaan kas daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan perhitungan analisis jalur dihasilkan bahwa pengelolaan kas daerah berpengaruh langsung sebesar 22,0% dan pengaruh tidak langsung melalui variabel peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 11,03% dengan kata lain total pengaruh pengelolaan kas daerah terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 33,03%.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2014) yang menyebutkan Pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengelolaan pendapatan serta belanja daerah. Penilaian akan pengelolaan keuangan pada daerah serta pendanaan pada pembangunan di daerah memiliki pengaruh yang besar. Kedua hal itu sangat menentukan posisi suatu pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi suatu daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Sartika et al., 2020) yang menyimpulkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dalam hal ini kemandirian keuangan daerah. 5. Pengaruh Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari perhitungan uji t (parsial), didapat nilai signifikansi variabel efektivitas pemungutan pajak sebesar $0,012 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_5 diterima yaitu peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan perhitungan analisis jalur dihasilkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh secara langsung terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 59,5% dan secara tidak langsung sebesar 38,7% dengan kata lain total pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 98,20%.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan (Latif et al., 2014) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat

kemandirian keuangan dari daerah, bisa dihitung dari besarnya total PAD pada besarnya total penerimaan serta total belanja daerah tersebut. Hal senada juga diungkapkan (Halim et al., 2014) yang menyatakan untuk menentukan kesediaan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah, khususnya bidang keuangan, dapat diukur dari kapasitas pendanaan yang apabila sepenuhnya dibiayai PAD dan bagi hasil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh P. Setiawan, Rina W, Liesma M, Nurhaida, Elmi O (2021) dan M.Wasil, Nika S, Putri Ayu Larasati, Nurliana M (2020) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 6. Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Pengelolaan Kas Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_6 diterima yang berarti secara simultan efektivitas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah berpengaruh terhadap variabel peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, variabel peningkatan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah sebesar 64,3% sisanya 35,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Hasil penelitian ini senada dengan pernyataan yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang menyebutkan komponen dari pendapatan asli daerah bisa bersumber dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Daerah berhak atas sumber keuangan termasuk kepastian menerima dana dari pemerintah berdasarkan atas wewenang pemerintah yang dilimpahkan, hak untuk pemungutan serta penggunaan pajak beserta retribusi daerah dan juga hak dalam menarik sebagian keuntungan pada sumber daya lokal serta dana perimbangan lainnya, hak dalam pengelolaan kekayaan daerah

serta perolehan akan sumber pendapatan lain yang sah. 7. Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak, Pengelolaan Kas Daerah, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_7 diterima yang berarti secara simultan efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, variabel kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 82,5% sisanya 17,5% dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil penelitian ini senada dengan pernyataan Halim (2014) bahwa ciri-ciri utama daerah bisa melakukan otonomi seperti (1) kemampuan dalam keuangan daerah, yang berarti daerah bisa melakukan kewenangan dalam hal penggalan, pengelolaan, dan penggunaan sumber keuangan daerahnya sendiri dalam hal pembiayaan aktivitas pemerintahan, dan (2) meminimalkan ketergantungan akan dana pemerintah pusat sehingga menjadikan PAD sebagai sumber keuangannya. Untuk dapat meminimalkan ketergantungan akan dana yang bersumber dari pemerintah pusat maka daerah harus menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber keuangannya, agar dapat menjadikan pendapatan asli daerah sebagai suatu sumber keuangan maka daerah harus mampu melakukan kewenangan atas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat serta Badan Pemeriksa

Keuangan Perwakilan Jawa Barat mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak, Pengelolaan Kas Daerah, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagian besar daerah memiliki rata-rata rasio yang berada pada kategori sangat efektif. Artinya sebagian besar daerah mampu melakukan penarikan jumlah pajak melebihi jumlah yang ditargetkan. Untuk variabel pengelolaan kas daerah hasil rekapitulasi responden berada pada kategori sangat baik, di mana pengelolaan kas daerah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Pada variabel peningkatan pendapatan asli daerah sebagian besar daerah mengalami penurunan dalam waktu satu tahun terakhir, di mana hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi covid yang menyebabkan penarikan jumlah pajak belum bisa optimal dimana kita tahu jika pajak merupakan komponen terbesar dalam pendapatan asli daerah. Untuk variabel kemandirian keuangan daerah sebagian besar daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat berada pada kategori rendah sekali dengan pola instruktif. Artinya sebagian besar daerah masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini juga menyiratkan jika sebagian besar daerah belum mampu melakukan otonomi fiskal, daerah masih menunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya.

Efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam peningkatan

pendapatan asli daerah, efektivitas pemungutan pajak memiliki andil atau pengaruh yang besar. Melalui aktivitas peningkatan pajak suatu daerah akan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah setinggi-tingginya.

Pengelolaan kas daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemandirian keuangan pada daerah memperlihatkan kemapanan Pemerintah Daerah dalam hal mendanai aktivitas pemerintahannya, pembangunan serta pelayanan pada masyarakat dimana masyarakat tersebut telah membayar pajak serta retribusi yang merupakan sumber yang diperlukan oleh daerah.

Pengelolaan kas daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penilaian akan pengelolaan keuangan pada daerah serta pendanaan pada pembangunan di daerah memiliki pengaruh yang besar dan sangat menentukan posisi suatu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kemandirian daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dimana tingkat kemandirian keuangan dari daerah, bisa dihitung dari besarnya total PAD pada besarnya total penerimaan serta total belanja daerah tersebut.

Efektivitas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah berpengaruh

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di mana sumber dari pendapatan asli daerah adalah berasal dari pajak dan retribusi daerah memiliki hak untuk pemungutan serta penggunaan pajak beserta retribusi daerah dan juga hak dalam menarik sebagian keuntungan pada sumber daya lokal.

Efektivitas pemungutan pajak, pengelolaan kas daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk dapat meminimalkan ketergantungan akan dana yang bersumber dari pemerintah pusat maka daerah harus menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber keuangannya, agar dapat menjadikan pendapatan asli daerah sebagai suatu sumber keuangan maka daerah harus mampu melakukan kewenangan atas pemungutan pajak dan pengelolaan kas daerah.

BIBLIOGRAFI

- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). *Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*. Brawijaya University. [Google Scholar](#)
- HADI, A. N. (2019). *Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Google Scholar](#)
- Halim, T. Y. F., Steer, C. A., Mathä, L., Gold, M. J., Martinez-Gonzalez, I., McNagny, K. M., McKenzie, A. N. J., & Takei, F. (2014). Group 2 innate lymphoid cells are

- critical for the initiation of adaptive T helper 2 cell-mediated allergic lung inflammation. *Immunity*, 40(3), 425–435. [Google Scholar](#)
- Hariyanto, T. I., Japar, K. V., Kwenandar, F., Damay, V., Siregar, J. I., Lugito, N. P. H., Tjiang, M. M., & Kurniawan, A. (2021). Inflammatory and hematologic markers as predictors of severe outcomes in COVID-19 infection: a systematic review and meta-analysis. *The American Journal of Emergency Medicine*, 41, 110–119. [Google Scholar](#)
- Imron, M. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Audit, Independensi dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit Investigasi pada Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *E-Journal Widyia Ekonomika*, 1(1), 58829. [Google Scholar](#)
- Karthikeyan, S., Pachamuthu, M. P., Isaacs, M. A., Kumar, S., Lee, A. F., & Sekaran, G. (2016). Cu and Fe oxides dispersed on SBA-15: A Fenton type bimetallic catalyst for N, N-diethyl-p-phenyl diamine degradation. *Applied Catalysis B: Environmental*, 199, 323–330. [Google Scholar](#)
- Latif, M., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2014). Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(2), 78–87. [Google Scholar](#)
- Modlin, S., & La Shonda, M. S. (2012). Cash management practices among southeastern county governments: Proper utilization or excessive caution. *Public Finance and Management*, 12(2), 100. [Google Scholar](#)
- Putri, N., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. [Google Scholar](#)
- Rahmi, A. (2013). Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3). [Google Scholar](#)
- Ravindran, B., Wong, J. W. C., Selvam, A., & Sekaran, G. (2016). Influence of microbial diversity and plant growth hormones in compost and vermicompost from fermented tannery waste. *Bioresource Technology*, 217, 200–204. [Google Scholar](#)
- Sartika, D., Monita, D. C., & Ilyas, A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi kasus pada BPKAD di Kota Padang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 195–209. [Google Scholar](#)
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68–74. [Google Scholar](#)
- Taylor, M., Yang, X., & Mardiasmo, A. (2014). SnowSports Interactive: a global start-up's challenges. *Global Strategy*, 3rd Edition, 431–435. [Google Scholar](#)
- Wulandari, A. (2021). PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011-2020. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO. [Google Scholar](#)

Copyright holder :

Nama penulis, nama penulis (2022).

First publication right :
Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

